



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Bangka Pos       Babel Pos       Radar Bangka  
 Babel News       Rakyat Pos       Lainnya : \_\_\_\_\_

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	2
																						0
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		7	8	9	10	11	12	1
																						9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

# SMA/SMK, SLB Babel Diaudit BPK

- Ada 3 Temuan Dugaan Penyimpangan
- Erzaldi Imbau Pihak Sekolah Tidak Takut

**PANGKALPINANG** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menemukan tiga hal menjadi temuan dari penatausahaan keuangan di sekolah yang menjadi kewenangan

Pemprov Babel. Inspektur Inspektorat Babel, Susanto menyebutkan, poin pertama adalah terkait pengelolaan dana IPP yang dari komite



sekolah banyak yang belum tertib, namun sudah diatur Pergub, harus ada pembukuan yang jelas.

"Inspektur

● ke Hal 11 Kol 1

## SMA/SMK, SLB Babel Diaudit BPK, .....

akan pemeriksaan dana IPP, kemudian temuan kedua adalah persediaan pada masing-masing sekolahan tidak tertib, kalau beli barang harus dicatat, produk keluar dimana, dan harus lengkap," urai Susanto.

Poin ketiga, lanjutnya, adanya pengelola dana IPP, banyak yang bukan dari guru atau pegawai sekolah, misalnya ada yang dari wali murid, padahal semestinya harus dari sekolah.

"Kami akan melakukan audit ke sekolah, mudah-mudahan nanti semuanya dapat tertib dan kita kembali mendapat opini WTP," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, mengimbau agar pihak sekolah, khususnya SMA, SMK dan SLB di Provinsi Babel, tidak takut menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemeriksaan ini, kata dia, dilakukan, sebagaimana mestinya untuk tertib administrasi, dan SMA SMK dan SLB kini sudah menjadi bagian dari kewenangan provinsi Babel, dan menjadi penilaian dalam opini BPK.

"Orang diperiksa kan takut,

padahal enggak, ini untuk kebaikan bersama, saya minta yang pertama sekali, jangan anti dengan pemeriksaan BPK, enjoy saja, karena mereka bukan mencari salah, tapi perbaiki sistem kita, apa yang belum benar diperbaiki, apa yang sudah benar lebih ditingkatkan lagi, agar kita dak keliru, kalau kita lah salah baru kita susah, pemeriksaan ini rutin, cuma memang ndak seperti biasanya karena dulu enggak diperiksa," terangnya, dihadapan kepala sekolah dan kepala TU SMA SMK dan SLB se-Babel, di ruang Mahligai Serumpun Sebalai, Kamis (2/5/2019).

Ia menyebutkan, ini untuk pertama kalinya BPK memeriksa penatausahaan keuangan di sekolah, untuk itu, harus intens komunikasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan capdin serta sekolah.

Ia juga meminta, bendahara, kepala TU dan kepala sekolah, menguasai penatausahaan keuangan ini, dan selaku upgrade pengetahuan, instansi terkait juga diminta untuk membekali para pemenang kuasa dan pegawai berwenang untuk upgrade ilmu dan pengetahuan, karena setiap tahun selalu berubah.

"Tolong Bapppeda harus upgrade mereka, contoh yang baik, kemampuan mereka harus ditingkatkan, khususnya kepek harus tau manajemen keuangan pendidikan yang baik dan benar, buat laporan jangan tunggu, apa yang keluar atau masuk, langsung kerjakan, enggak ada cash bon, kepek harus paham bener, saya gak mau menemukan kepek mengerjakan sendiri, harus kerjasama," ingatnya.

Ia menginginkan, laporan tahun 2019 ini dapat diperbaiki, sehingga Pemprov tetap bisa mempertahankan opini WTP.

Tak hanya itu, dikumpulkannya kepala sekolah dan Kabag TU ini, berkenaan dengan verifikasi pertanggungjawaban kekurangan, peningkatan sumber daya manusia, sdm guru, yang dibahas bersama, dan pertemuan ini rutin dilaksanakan setiap empat bulan sekali.

"Kendalanya, terkadang rentan karena terlalu panjang, dari OPD Bakuda misalnya ke dinas, capdin ke sekolah, nanti urusannya sekolahan ke capdin saja," imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Babel, M. Soleh

menyebutkan, rapat penatausahaan keuangan dan aset di bidang pendidikan ini, menyangkut banyak hal yang perlu dibahas bersama.

"Tolong dicermati, untuk memperbaiki segala sesuatu berkaitan pelaporan keuangan di 2018, bahwa untuk pertanggungjawaban yang paling kompleks penyelesaian paling lama di Dinas Pendidikan, baik capdin, UPTD satu kesatuan, bermasalah satu saja itu bermasalah saja ke seluruh dan ke Pemprov Babel," bebernya.

Selain pertemuan Kepek dan kabag TU, bendahara juga mengikuti bimtek di puncak. Soleh mengingatkan, Kepek dan kepala TU untuk mencermati, jangan sampai temuan tahun ulang terulang kembali.

"Ini tanggungjawab kita semua, karena ini tanggungjawab minta bener-bener menjadi perhatian. Tahun ini saya ingatkan, laporan apapun, mulai dari bantuan pemerintah, BOS APBN dan DAK minta dirapihkan, dan dicek berulang sehingga permasalahan yang ada tak terulang kembali, mudah-mudahan kehadiran kita memperbaiki yang kurang," pesannya. (nov/6)